

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi darat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membangun suatu daerah kabupaten atau kota dalam menunjang kelancaran bidang perekonomian, pendidikan, dan urusan pemerintahan serta kepentingan umum lainnya. Angkutan umum sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat. (Widayanti et al., 2014).

Transportasi darat di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat salah satunya ialah angkutan umum, angkutan umum ini sekarang dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk berpergian dan membantu masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, selain itu memiliki peran yang sangat penting di sektor perekonomian, pendidikan, urusan pemerintah, dan kepentingan umum lainnya (Chotib, 2019).

Angkutan umum dari segi aksesibilitas memiliki fasilitas penunjang diantaranya terminal, tempat pemberhentian, dan jalan dari 3 fasilitas ini merupakan simpul transportasi yang sangat perlu diperhatikan. Fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya pada sektor sarana transportasi darat dalam kota yaitu angkutan perkotaan di wilayah Kabupaten Ciamis dan fasilitas penunjang yaitu tempat pemberhentian angkutan perkotaan agar memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan.

Dalam pembangun prasarana transportasi untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan potensi yang dimiliki suatu daerah dimana sasaran pembangunan prasarana transportasi tersebut untuk mempertahankan tingkat pelayanan, meningkatkan aksesibilitas pelayanan yang meliputi aspek keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan serta keamanan pelayanan transportasi, maka perlu dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pengembangan prasarana (Sari dan Hu, 2019).

Berdasarkan data yang saya dapatkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis terdapat 13 trayek angkutan perkotaan, jumlah tersebut

sudah sesuai dengan hasil kondisi eksisting yang saya lihat secara langsung di lapangan, dan berdasarkan dari survei inventarisasi prasarana angkutan umum didapatkan data mengenai jumlah tempat pemberhentian angkutan umum yang tersebar pada trayek angkutan perkotaan di Kabupaten Ciamis yang berjumlah 19 halte dan 7 bus stop dengan rambu, sedangkan berdasarkan data inventarisasi prasarana terdapat beberapa tempat pemberhentian angkutan perkotaan yang kondisinya kurang baik dan ditemukan beberapa tempat pemberhentian angkutan perkotaan yang telah beralih fungsi menjadi tempat berjualan dan tempat parkir. Di kawasan tersebut para pengguna angkutan perkotaan lebih sering menunggu di tepi jalan dikarenakan fasilitas tempat pemberhentian yang kurang optimal dalam penempatan lokasinya dan banyak angkutan yang tidak berhenti pada tempat pemberhentian yang tersedia. Selain itu lokasi kantong penumpang yang seharusnya terdapat fasilitas pemberhentian namun tetapi tidak tersedia mengakibatkan para penumpang yang akan menggunakan angkutan perkotaan menunggu di pinggir jalan. Sehingga perlu dilakukannya evaluasi karena belum memenuhi standar teknis yang berlaku.

Kondisi prasarana tempat pemberhentian angkutan perkotaan yang kurang optimal mengakibatkan bertambahnya permasalahan transportasi dikarenakan masyarakat saat ini belum menggunakan fasilitas tempat pemberhentian angkutan perkotaan secara optimal sehingga prasarana tersebut menjadi kurang dimanfaatkan dengan baik dan banyak pengguna malas menggunakan fasilitas angkutan perkotaan dan sering memilih menunggu ditempat yang bukan seharusnya.

Oleh sebab itu, perlu dilakukannya evaluasi dan identifikasi permasalahan terhadap fasilitas tempat pemberhentian angkutan umum agar dapat meningkatkan penggunaan angkutan umum apabila fasilitas tempat pemberhentian dalam kondisi yang nyaman, aman, dan tertib sesuai fungsinya (Bawana dan Rachmawati, 2020). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam menyusun Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, penulis mengambil judul yaitu "Evaluasi Kebutuhan Fasilitas Tempat Pemberhentian

Angkutan Perkotaan di Kabupaten Ciamis”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya minat penumpang untuk naik dan turun di tempat pemberhentian angkutan perkotaan dikarenakan kondisi fasilitas tempat pemberhentian yang kurang baik.
2. Kebutuhan fasilitas tempat pemberhentian angkutan perkotaan yang masih kurang terpenuhi sehingga diperlukan beberapa titik lokasi tempat pemberhentian usulan yang baru sesuai dengan kebutuhan.
3. Dibutuhkan titik lokasi dan desain usulan tempat pemberhentian untuk merencanakan pembangunan tempat pemberhentian sesuai dengan pedoman teknis.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting dari keberadaan tempat pemberhentian angkutan perkotaan di Kabupaten Ciamis sudah sesuai dengan fungsinya?
2. Bagaimana cara menentukan lokasi tempat pemberhentian angkutan perkotaan agar sesuai dengan kebutuhan?
3. Bagaimana kondisi fasilitas tempat pemberhentian angkutan perkotaan agar sesuai dengan kebutuhan?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan fasilitas tempat pemberhentian angkutan perkotaan di Kabupaten Ciamis sesuai dengan pedoman teknis agar penggunaannya berfungsi dengan baik dan memberikan jaminan keselamatan serta kenyamanan bagi pengguna angkutan perkotaan dalam melakukan perpindahan moda.

Tujuan dari penulisan kertas kerja wajib ini adalah sebagai:

1. Mengidentifikasi fasilitas pemberhentian angkutan perkotaan eksisting yang ada di Kabupaten Ciamis.
2. Menganalisis jumlah kebutuhan tempat pemberhentian angkutan perkotaan di Kabupaten Ciamis yang ideal berdasarkan pedoman teknis.
3. Memberikan rekomendasi, usulan penyediaan fasilitas dan desain tempat pemberhentian angkutan perkotaan yang tepat berdasarkan pedoman teknis.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Ciamis yang di lewati oleh jaringan trayek angkutan perkotaan.
2. Melakukan analisis kebutuhan pemberhentian angkutan perkotaan dan evaluasi fasilitas tempat pemberhentian angkutan perkotaan kondisi saat ini yang sesuai dengan pedoman teknis.
3. Menentukan titik tempat pemberhentian berdasarkan tata guna lahan dan kantong penumpang.
4. Hanya mengkaji terkait dengan fasilitas tidak sampai biaya pembangunan tempat pemberhentian angkutan umum.